

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab IV maka dapat diperoleh kesimpulan tentang prosedur penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Prosedur penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat dilakukan melalui aplikasi E-Kinerja yang dapat diakses melalui link <https://ekinerja.sumbarprov.go.id/expneo/>. Tahapan penilaian kinerja PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, antara lain perencanaan kinerja, verifikasi oleh atasan, input data kinerja, evaluasi data kinerja, dan penilaian kinerja.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam penerapan prosedur penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, yaitu kurangnya pemahaman dan keterampilan pegawai dalam menggunakan aplikasi E-Kinerja, aplikasi yang sering error dan sulit diakses, dan Jaringan internet yang lambat dan tidak stabil.

3. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam penerapan prosedur penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan pegawai dalam menggunakan aplikasi E-Kinerja melalui pelatihan dan pendampingan, melakukan sosialisasi dan komunikasi yang efektif kepada pegawai, meningkatkan kualitas jaringan internet, dan meningkatkan kualitas server aplikasi E-Kinerja.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan yang sudah dijelaskan pada bab IV maka dapat ditemukan beberapa saran tentang prosedur penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat agar terus mengadakan pelatihan dan pendampingan dalam menggunakan aplikasi E-Kinerja kepada pegawai yang masih kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut dan memberikan sosialisasi tentang pengoperasian aplikasi dan manfaatnya, agar prosedur penilaian kinerja pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan aplikasi E-Kinerja menjadi efektif dan efisien.

2. Pihak Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan kualitas jaringan internet dengan mengadakan kerjasama atau berkoordinasi dengan pihak penyedia jaringan internet dan meningkatkan kualitas server aplikasi E-Kinerja dengan memperbaharui dan memelihara aplikasi secara berkala dan bisa dibantu oleh instansi yang berkaitan dengan teknologi informasi jika mengalami kesulitan.

